BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *Supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari proses Penyelenggara Negara, institusi kepolisian pun terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum.

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka menuju masyarakat adil dan

makmur tersebut, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang hukum.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan (*force*). Kekuasaan itu sendiri seiring bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan kewenangan atau kekuasaan pada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya sebab hukum mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum. Dengan demikian hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya.

Menurut Warsito Hadi Utomo, “Setiap Negara Hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian Negara yang secara universal

mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat yang berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Peran kepolisian tersebut diatas sepertinya hanya berupa slogan saja, dimana konsistensi mengenai tugas dan wewenang dari kepolisian sampai saat ini belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya kesenjangan dari tujuan hukum.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat, kebanyakan pada umumnya mereka memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.¹

Penyidikan itu sendiri merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polri. Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti

¹Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), hal.120.

didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Seperti halnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Reskrim Polsek Cisauk terhadap tersangka tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor, sesuai dengan Putusan No: 1978/Pid.B/2012/PN. TNG Jo. No: 55/PID/2013/PT. BTN terdapat kekerasan fisik oleh penyidik terhadap tersangka didalam pemeriksaan untuk mendapatkan suatu pengakuan atas kejahatan tertentu, tak jarang kekerasan oleh penyidik tersebut dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang anggota Polri. Selain itu, perbuatan yang demikian bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Polri sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban didalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik, kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM yang begitu besar oleh pejabat Polri ketika sedang menjalankan tugas. Tugas penegakan hukum merupakan tugas yang sangat

berat yang harus diemban oleh seorang polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Permasalahan timbul ketika masyarakat menganggap kekerasan yang digunakan polisi telah melampaui batas, sehingga tidak tercipta rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan keberadaan masalah tersebut di atas, penulis lebih lanjut termotivasi untuk menganalisa dan mengkaji yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini terkait dengan permasalahan tentang penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1978/PID.B/2012/PN. TNG JO. NOMOR: 55/PID/2013/PT. BTN)

1.2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah teori labeling dapat diperlakukan terhadap penyidik pada Putusan No: 1978/Pid.B/2012/PN. TNG Jo. No: 55/PID/2013/PT. BTN?

2. Apakah yang menjadi landasan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara No: 55/PID/2013/PT. BTN yang mengurangi hukuman terdakwa menjadi 1 (satu) tahun penjara?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum

Penulisan ini dibuat dalam rangka memperoleh pengetahuan lebih menyeluruh dan mendalam mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam hal ini adalah penyidik.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini disusun sesuai berdasarkan dengan uraian di dalam perumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami keterkaitan teori labeling terhadap anggota Polri dalam hal ini penyidik yang melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka.
2. Mengetahui dan memahami dasar landasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memberikan pengurangan hukuman menjadi 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

1. Tersangka adalah:

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Kepolisian adalah:

Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penyidik adalah:

Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

4. Penyidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Pelanggaran adalah:

Perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji/jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Tindakan Kepolisian adalah:

Upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta

benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

7. Kekerasan adalah:

Segala tindakan atau ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.

8. Penyiksaan adalah:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.

9. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

10. Upaya Hukum adalah:

Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

1.5. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu penelitian. Tanpa adanya metodologi, peneliti tidak akan bisa untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah tertentu, untuk mengungkapkan suatu kebenaran.²

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

1.5.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

² Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Ed. 1, Cetakan 20, (Jakarta: Bina Persada, 2011), hal. 12.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum misalnya hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder, adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum

(buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Maka dengan mempergunakan metode kualitatif seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan materi skripsi, maka penulisan ini dibagi ke dalam lima bab yang secara berturut-turut akan membahas sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bentuk dan Komponen Sistem

Peradilan Pidana Indonesia, Tugas dan Wewenang Polri menurut Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan menurut Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Konsep dan Bentuk Bantuan Hukum terhadap tersangka, Hukum Positif yang mengatur tentang Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan, kemudian penulis juga akan membahas tentang Hak-hak Tersangka yang diatur diluar KUHAP.

BAB IV ANALISA KASUS KEKERASAN FISIK OLEH PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1978/PID.B/2012/PN. TNG JO. NOMOR : 55/PID/2013/PT. BTN)

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kasus posisi, dakwaan penuntut umum dan amar putusan dari majelis hakim. Kemudian penulis juga akan menganalisa keterkaitan teori labeling terhadap penyidik yang melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka, juga penulis akan menganalisa dasar landasan majelis

hakim pengadilan tinggi mengurangi hukuman terdakwa menjadi 1 (satu) tahun penjara.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil dari penulisan skripsi ini.